

## Dampak Perkembangan Reformasi Kebijakan CAP (Common Agricultural Policy) Terhadap Pertanian Prancis Pada Tahun 2023-2025

Chyntya Damayanti Rambu Mbali<sup>1</sup>, Vivy Marlianti Taneo<sup>1\*</sup>, Yeyen Subandi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding author : [taneovivymarlianti@mail.com](mailto:taneovivymarlianti@mail.com)

### Article History:

Received : 26-01-2026

Accepted : 08-02-2026

**Keywords:** Kebijakan Pertanian Eropa (CAP); Reformasi CAP; Ketahanan Pangan; Pertanian Berkelanjutan Prancis

### ABSTRAK

Periode 2023-2025 ditandai dengan fase baru dari implementasi reformasi Kebijakan Pertanian Bersama (Common Agricultural Policy/CAP) Uni Eropa yang memberikan dampak mendalam terhadap sektor pertanian Prancis sebagai penerima dana CAP terbesar. Penelitian ini mengkaji implikasi kebijakan tersebut khususnya dalam aspek ekologis, digitalisasi, dan pemerataan pendapatan terhadap produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, serta stabilitas ketahanan pangan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintahan Prancis dan studi akademis berupa jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun reformasi CAP mendorong praktik pertanian berkelanjutan dan adopsi inovasi teknologi, tantangan muncul dari ketimpangan distribusi insentif dan beban administratif yang dirasakan tidak proporsional oleh petani kecil. Efektivitas CAP 2023-2025 di Prancis sangat ditentukan oleh sinergi antara kerangka Uni Eropa dan Kapasitas Implementasi Domestik.

### PENDAHULUAN

Evolusi kebijakan agraris di Tingkat supranasional Eropa merupakan salah satu integrasi ekonomi dan politik yang cukup ambisius dalam sejarah modern. Kebijakan pertanian bersama atau *Common Agricultural Policy* (CAP) merupakan salah satu program yang lahir dari rahim Perjanjian Roma pada tahun 1957 dan secara resmi diimplementasikan pada tahun 1962 oleh enam negara pendiri Komunitas Ekonomi Eropa (KEE). Pada masa pembentukannya, program ini dirancang sebagai upaya atau mekanisme perlindungan dan stimulasi produksi untuk memastikan keamanan/kedaulatan pangan benua Eropa yang pada saat itu masih merasakan dampak dari kehancuran Perang Dunia II (OECD, 2025).

Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui pengembangan kemajuan secara teknis, menjamin kelayakan standar hidup komunitas petani, memastikan ketersediaan pasokan pangan dan menstabilkan pasar. Secara struktural, CAP edisi awal sangat bergantung pada mekanisme dukungan harga domestik atau price floor, di mana otoritas Eropa akan membeli kelebihan produksi petani jika harga pasar jatuh di bawah tingkat intervensi tertentu. Hal ini menciptakan sistem proteksionisme yang kuat melalui pungutan impor dan subsidi ekspor, yang pada akhirnya memicu surplus produksi masif di era 1970-an dan 1980-an, yang dikenal dengan istilah "gunung mentega" dan "danau anggur" (Commission, 2023).

Sebelum gelombang reformasi terbaru periode 2023-2027, struktur Kebijakan Pertanian Bersama (CAP) Uni Eropa telah mengalami pergeseran paradigma signifikan melalui

Reformasi MacSharry tahun 1992 dan Agenda 2000, yang mengubah fokus utama dari dukungan harga berbasis komoditas menjadi pembayaran pendapatan langsung yang terpisah (*decoupled*) dari volume produksi, sehingga memungkinkan petani lebih fleksibel dalam keputusan usaha tani mereka. Hingga tahun 2022, kerangka kebijakan ini bertumpu pada dua pilar utama: Pilar I yang mencakup pembayaran langsung kepada petani dan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga, serta Pilar II yang berorientasi pada pembangunan pedesaan dan pelestarian lingkungan dengan menawarkan fleksibilitas bagi negara anggota dalam mendanai inovasi lokal dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Pilar I mendominasi alokasi anggaran sebesar 70-80% dari total dana CAP, sementara Pilar II meskipun lebih kecil memberikan ruang bagi program-program yang mendukung keberlanjutan pedesaan. Meskipun periode 2014-2020 telah menyisipkan elemen "penghijauan" (*greening*) melalui tiga persyaratan wajib berupa diversifikasi tanaman, pemeliharaan padang rumput permanen, dan penciptaan area fokus ekologis, banyak pihak mengkritik instrumen tersebut sebagai pendekatan yang bersifat administratif semata dan belum mampu mengatasi secara fundamental degradasi biodiversitas serta krisis iklim yang semakin mendesak di wilayah pedesaan Eropa (Commission, 2023).

Prancis merupakan salah satu negara yang memainkan peran sentral dalam aktivitas agraris Uni Eropa dengan luas lahan pertanian sekitar 28 juta hektar, yang mencakup hampir setengah dari total wilayah kedaulatan nasionalnya. Sektor pertanian tidak hanya berfungsi sebagai pilar ekonomi, tetapi juga sebagai fondasi identitas nasional dan penopang stabilitas sosial di wilayah pedesaan. Selama era "Les Trente Glorieuses" (1946-1975), pertanian Prancis mengalami transformasi mendalam dari pola tradisional-subsistensi menuju sistem modern yang sangat termekanisasi dan berorientasi pasar, menjadikan negara ini sebagai produsen pangan terdepan di Uni Eropa dengan nilai produksi mencapai 72,9 miliar Euro didominasi oleh anggur, produk susu, sereal, dan daging sapi (Muliawaty, 1997).

Namun, kemajuan tersebut datang dengan biaya sosial dan lingkungan yang tinggi sebelum reformasi CAP 2023, petani Prancis menghadapi paradoks kesejahteraan di mana produktivitas tinggi tidak diimbangi dengan pendapatan memadai rata-rata 40% lebih rendah dibandingkan pekerja non-pertanian sehingga 17,4% rumah tangga petani hidup di bawah garis kemiskinan, disertai peningkatan risiko bunuh diri sebesar 43% dibandingkan populasi umum. Selain itu, ketergantungan pada input kimiawi dan simplifikasi lanskap agraris telah menimbulkan tekanan serius terhadap keanekaragaman hayati serta kualitas air tanah di wilayah pertanian utama (Midler, 2023). Hal ini yang kemudian menjadi faktor pendorong bagi penulis untuk melihat bagaimana perkembangan pertanian di Prancis pasca reformasi kebijakan CAP pada tahun 2023–2025.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan bagian dari naskah yang menjelaskan langkah-langkah sistematis dalam menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analitis dengan dukungan data kuantitatif sekunder, mengingat fokus kajian terletak pada analisis kebijakan publik serta implikasinya terhadap sektor pertanian. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen kebijakan Uni Eropa dan Pemerintah Prancis terkait reformasi *Common Agricultural Policy* (CAP) periode 2023–2025, laporan resmi lembaga internasional, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Data

kuantitatif sekunder digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis, khususnya terkait indikator produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, dan aspek keberlanjutan lingkungan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses reduksi data, kategorisasi tema, dan interpretasi kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Creswell (2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan Pertanian Bersama (Common Agricultural Policy/CAP) Uni Eropa telah mengalami evolusi signifikan sejak pertama kali diterapkan pada tahun 1962. Pada awalnya, CAP dirancang sebagai respons terhadap krisis pangan pasca-Perang Dunia II, dengan fokus utama pada peningkatan produksi pangan melalui mekanisme subsidi langsung kepada petani dan intervensi harga oleh negara (Swinnen, 2018). Tujuan utamanya adalah menjamin ketahanan pangan dan stabilitas pendapatan petani di seluruh wilayah Eropa. Namun, pendekatan ini lambat laun menimbulkan distorsi pasar, surplus produksi, serta dampak lingkungan yang merugikan, sehingga mendorong serangkaian reformasi struktural dalam beberapa dekade berikutnya.

Seiring waktu, CAP bertransformasi dari kebijakan yang bersifat proteksionis menjadi kerangka kebijakan pertanian yang multidimensi, yang tidak hanya mengejar efisiensi ekonomi tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan ekologis (Pe'er, 2022). Reformasi terbaru untuk periode 2023–2027 secara eksplisit menempatkan keberlanjutan lingkungan, inovasi digital, serta ketahanan sistem pangan sebagai prioritas utama. CAP kini mendorong praktik pertanian berkelanjutan melalui skema “eco-schemes” dan integrasi agenda European Green Deal, termasuk Farm to Fork Strategy dan Biodiversity Strategy, sebagai respons terhadap tantangan global seperti perubahan iklim dan degradasi ekosistem (European Commission, 2021; Pe'er, 2022).

Reformasi terkini kebijakan pertanian bersama (Common Agricultural Policy/CAP) Uni Eropa menandai pergeseran paradigma dari fokus pada peningkatan produksi menuju penguatan daya saing sektor pertanian dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Saat ini, CAP mendorong petani untuk menyesuaikan diri dengan dinamika pasar global sekaligus memenuhi standar lingkungan yang semakin ketat dengan mengganti subsidi berbasis output menjadi insentif yang berorientasi pada kinerja lingkungan dan sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi sektor pertanian sekaligus meminimalkan dampak ekologisnya harus sejalan dengan agenda strategis Uni Eropa seperti European Green Deal dan Farm to Fork Strategy dalam periode 2023-2027 (European Commission, 2021). Melalui skema “eco-schemes” dan persyaratan kondisionalitas (*conditionality*), CAP kini menjadi instrumen kunci dalam mewujudkan transisi sistem pangan Eropa yang lebih hijau, adil, dan tangguh terhadap krisis global seperti perubahan iklim dan gangguan rantai pasok.

Salah satu ciri utama reformasi terbaru Kebijakan Pertanian Bersama (CAP) adalah pemberian fleksibilitas yang lebih luas kepada negara anggota dalam menyusun Rencana Strategis Nasional (National Strategic Plans/NSPs) meskipun tetap harus selaras dengan target kolektif Uni Eropa khususnya dalam perlindungan iklim dan keanekaragaman hayati (UPI, 2024). Dalam konteks ini Prancis memainkan peran strategis sebagai produsen pertanian terbesar di Uni Eropa yang menyumbang sekitar 18% dari total nilai produksi pertanian blok tersebut sekaligus penerima alokasi CAP terbesar dengan pembayaran langsung dari CAP mencakup 88% rata-rata dari pendapatan sebelum pajak petani Prancis. Posisi dominan ini

justru mendorong Prancis untuk secara konsisten memperjuangkan anggaran CAP yang signifikan terutama pada pilar 1 yang menandai subsidi langsung kepada petani.

Secara keseluruhan, reformasi CAP mencerminkan ambisi Uni Eropa untuk mentransformasi sistem pertanian menjadi lebih berkelanjutan dan adil. Namun, kasus Prancis menunjukkan bahwa kesuksesan implementasi sangat bergantung pada keseimbangan antara insentif ekonomi, kepatuhan lingkungan, dan penerimaan sosial di kalangan petani. Tanpa harmonisasi ketiga elemen ini, risiko resistensi politik dan kegagalan kebijakan akan terus menghantui transisi hijau di sektor pertanian Eropa.

### **Rencana Strategis Nasional (PSN) Prancis 2023-2027**

Prancis, sebagai negara penghasil pertanian terbesar di Uni Eropa, telah menerapkan Rencana Strategis Nasional (Plan Stratégique National atau PSN) yang disetujui secara resmi pada akhir 2022 untuk meningkatkan daya saing berkelanjutan dan kedaulatan pangan. Anggaran PSN Prancis mencapai sekitar 50 miliar Euro, di mana 72% dialokasikan untuk Pilar I (dana EAGF) guna menjamin stabilitas pendapatan melalui pembayaran langsung, sementara sisanya mendukung pembangunan pedesaan di bawah Pilar II (dana EAFRD) (Midler E, 2022). Prancis merupakan produsen utama yang menyumbang sekitar 18% dari total produksi pertanian Uni Eropa dengan nilai produksi mencapai 72,9 miliar Euro. Strategi dalam PSN ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan ketahanan unit usaha tani sekaligus membatasi penggunaan input kimia demi mencapai netralitas karbon. Selain itu, rencana ini mengkombinasikan elemen nasional dan regional guna memastikan dukungan diberikan secara spesifik sesuai dengan karakteristik wilayah lokal (Commission, 2024).

Instrumen kebijakan dalam PSN Prancis dirancang untuk mendistribusikan bantuan secara lebih adil melalui mekanisme konvergensi internal yang menargetkan keseragaman pembayaran per hektar sebesar 90% pada tahun 2026. Prancis juga mengalokasikan bantuan terkait (*coupled aid*) yang berfokus pada sektor-sektor kritis, di mana anggaran untuk tanaman protein nabati meningkat signifikan sebesar 70% dibandingkan tahun 2020 guna mencapai otonomi pakan. Dukungan untuk wilayah dengan hambatan alam (ICHN) tetap dipertahankan dengan fokus utama pada pemeliharaan padang rumput dan peternakan di wilayah pegunungan (Europe, 2022). Pemerintah Prancis juga menargetkan peningkatan luas lahan organik hingga mencapai 18% dari total lahan pada tahun 2027 melalui tambahan anggaran konversi tahunan. Hal ini didukung oleh penetapan standar kesejahteraan hewan yang lebih ketat, termasuk pembatasan jumlah hewan berdasarkan luas lahan dan promosi akses luar ruangan (Commission, 2024).

### **Dampak Reformasi Kebijakan CAP Pada Perkembangan Pertanian Prancis 2023-2024**

Pada saat memasuki tahun-tahun awal implementasi, sektor pertanian Prancis menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan di mana nilai tambah bruto per pekerja dalam istilah riil turun sebesar 9,6% pada tahun 2023 dan diperkirakan akan jatuh lebih dalam hingga 13,0% pada tahun 2024. Penurunan ini dipicu oleh cuaca ekstrem, termasuk curah hujan di atas rata-rata dan kurangnya paparan sinar matahari, yang secara drastis memukul volume produksi gandum dan anggur (Gloomy, 2024). Nilai produksi tanaman secara keseluruhan mengalami penurunan tajam sebesar 15,7% akibat kombinasi antara penurunan output fisik dan melandasinya harga komoditas global. Kondisi ini memperburuk krisis pendapatan di mana satu dari tiga petani Prancis menyatakan keinginan untuk berhenti bekerja dalam lima tahun ke depan, dengan kesulitan ekonomi menjadi alasan utama yang meningkat dua kali lipat

dibanding tahun sebelumnya. Meskipun terdapat penurunan harga input seperti pupuk sebesar 4,7% hingga 8%, hal tersebut belum mampu mengimbangi kerugian nilai produksi total (Géry, 2024).

Penerapan Arsitektur Hijau melalui mekanisme Eco-Schemes menjadi salah satu inovasi utama yang mulai diuji coba secara luas di Prancis. Prancis mengalokasikan dana terbesar di Uni Eropa untuk skema ini, yakni sebesar 8,53 miliar Euro, yang setara dengan 25% dari total anggaran pembayaran langsung. Skema ini menawarkan tiga jalur akses sukarela: praktik agroekologis, sertifikasi lingkungan, dan biodiversitas (IAE), dengan pembayaran yang independen dari hak pembayaran dasar (DPB) (Moore, 2024).

#### 1. Kedaulatan Pangan, *Degressivity* dan Ketimpangan Pendapatan

Prancis menempatkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) sebagai prioritas strategis untuk melindungi petani dari asimetri kekuasaan di pasar global dan tekanan impor yang tidak memenuhi standar lingkungan Eropa. Konsep kedaulatan pangan ini didefinisikan sebagai hak bangsa untuk mengembangkan kapasitas produksi pangan dasarnya sendiri sambil menghormati keragaman budaya (Patel, 2009). Dalam PSN Prancis, kedaulatan diupayakan melalui mekanisme *degressivity* (pengurangan bantuan untuk pembayaran di atas 20.000 Euro) dan *capping* (batas atas 100.000 Euro) guna menciptakan distribusi bantuan yang lebih adil. Mekanisme ini diperkirakan dapat menghasilkan penghematan anggaran sebesar 3% hingga 12% di Prancis, yang kemudian dialihkan untuk mendanai instrumen pembangunan pedesaan sebagai kompensasi bagi petani kecil.

Prancis mengalokasikan sekitar 3,5 miliar Euro untuk pembayaran redistributif (CRISS) guna memperkuat ketahanan unit usaha tani skala menengah (Dziubińska, 2022). Namun, kebijakan ini memunculkan trade-off yang kompleks antara kedaulatan nasional dan efisiensi ekspor. Sekitar 73% dari total luas lahan pertanian di Prancis dikelola oleh petani besar yang terkena dampak pemotongan bantuan, yang dikhawatirkan akan melemahkan daya saing ekspor Prancis. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan sosial untuk mendukung petani kecil dan kebutuhan ekonomi untuk mempertahankan skala industri. Selain itu, ketergantungan pada impor protein nabati dari Amerika Selatan untuk pakan ternak masih menjadi titik lemah struktural yang terus diupayakan penyelesaiannya melalui insentif produksi domestik.

#### 2. Resistensi Sosial Petani dan Respons Kebijakan Uni Eropa (Protes Petani 2024)

Ketegangan antara ambisi ekologis CAP dan realitas ekonomi petani memuncak pada gelombang protes masif pada awal 2024, yang dipicu oleh rendahnya pendapatan, beban administratif, dan standar regulasi yang dianggap menghambat produktivitas. Petani Prancis, melalui serikat seperti FNSEA dan Confédération Paysanne, menuntut penyederhanaan birokrasi dan penangguhan standar GAEC 8 yang mewajibkan penyisihan lahan produktif untuk biodiversitas. Protes ini diwarnai dengan aksi pengepungan jalan tol dan blokade pelabuhan, yang mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap kebijakan impor gandum Ukraina dan perjanjian Mercosur. Sebagai respons, pemerintah Prancis terpaksa membatalkan rencana kenaikan pajak diesel pertanian dan membekukan sementara rencana pengurangan pestisida "Ecophyto" (Veitch, 2025).

Di tingkat supranasional, Komisi Eropa menyetujui paket penyederhanaan yang mulai berlaku pada 25 Mei 2024 dengan sifat retroaktif untuk melindungi petani di tahun tersebut. Paket ini secara resmi menghapus kewajiban menyisihkan 4% lahan bera (GAEC 8) dan

menggantinya dengan skema insentif sukarela melalui eco-schemes. Selain itu, petani kecil dengan lahan di bawah 10 hektar kini dibebaskan sepenuhnya dari kontrol administratif dan penalti terkait standar lingkungan guna mengurangi beban operasional. perubahan juga dilakukan pada standar GAEC 1 mengenai padang rumput permanen untuk mengakomodasi petani yang tidak lagi memiliki hewan ternak akibat perubahan struktur usaha. Fleksibilitas ini juga mencakup pengakuan terhadap sertifikasi organik sebagai pemenuhan otomatis atas standar kondisionalitas lingkungan.

### **Analisis Teori Intergovernmentalisme dan Diplomasi Pertanian Prancis**

Penelitian ini dianalisa menggunakan teori Intergovernmentalisme Liberal dari Andrew Moravcsik, yang dimana menyatakan bahwa integrasi Uni Eropa merupakan hasil dari pilihan rasional pemimpin nasional yang didorong oleh preferensi kelompok kepentingan domestik. Teori ini memiliki asumsi dasar bahwa negara bertindak secara rasional dalam mengejar tujuan yang didefinisikan oleh tekanan sosial domestik melalui negosiasi antar-pemerintah (Moravcsik, 2018). Dalam kasus CAP, Prancis merupakan negara yang secara konsisten memanfaatkan dinamika forum Brussels untuk memastikan otonomi nasional dalam mendistribusikan dana pertanian sesuai preferensi sektor agrarisnya yang kuat. Pilihan Prancis untuk mempertahankan 72% anggaran pada pembayaran langsung mencerminkan keberhasilan lobi petani domestik dalam mengamankan stabilitas pendapatan (l'Agriculture, 2022).

Preferensi nasional ini yang menjadi salah satu program yang cukup ambisius dari pemerintah Prancis kemudian dibawa ke tahap tawar-menawar antar-pemerintah di mana Prancis sering berkoalisi dengan negara-negara Mediterania untuk menentang pemotongan anggaran drastis. Keberhasilan memperjuangkan "Model Pengiriman Baru" menunjukkan bahwa negara anggota tetap menjadi "tuan atas perjanjian" (*masters of the treaty*) yang mampu merancang PSN secara spesifik (Grochowska R. , 2023). Proses integrasi yang dilakukan tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap krisis, seperti yang terlihat ketika pemerintah Prancis memaksa Uni Eropa memberikan fleksibilitas kebijakan pasca-protos 2024 untuk menjaga legitimasi politik domestik. Hal ini membuktikan bahwa negara anggota hanya akan memberikan kedaulatan kepada institusi supranasional sejauh hal tersebut melayani kepentingan ekonomi dan stabilitas politik nasional mereka.

### **KESIMPULAN**

Reformasi CAP 2023-2025 telah menempatkan pertanian Prancis dalam periode transisi yang penuh ketidakpastian antara ambisi keberlanjutan global dan ketahanan ekonomi lokal. Meskipun PSN Prancis menawarkan instrumen yang canggih untuk transisi agroekologi, realitas penurunan pendapatan yang tajam dan gejolak sosial menunjukkan adanya celah antara desain kebijakan dan implementasi lapangan. Kedaulatan pangan tetap menjadi motif utama diplomasi Prancis di Uni Eropa, yang kini diperjuangkan melalui tuntutan atas persaingan yang adil dan penyederhanaan regulasi bagi petani kecil. Keberhasilan jangka panjang pertanian Prancis akan sangat bergantung pada kemampuan untuk mensinergikan target lingkungan Green Deal dengan model ekonomi yang mampu menjamin kesejahteraan dan stabilitas produksi pangan di tengah krisis iklim. Dari perspektif Intergovernmentalisme Liberal Moravcsik, dinamika CAP mencerminkan dominasi preferensi nasional Prancis melalui lobi petani kuat, yang berhasil memperoleh otonomi PSN untuk melindungi 18% pangsa produksi (72,9 miliar Euro) sambil memitigasi pengurangan input kimia. Analisis teori ini menunjukkan

keberhasilan bergantung pada tawar-menawar antarnegara, bukan spillover UE otomatis. Prancis harus mensinergikan Green Deal dengan model ekonomi untuk kesejahteraan petani di tengah krisis iklim.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bureau, J.-C. (2024). The French strategic plan: Its main characteristics and its positioning in relation to the challenges and issues defined at European level. *Innovations Agronomiques*, 90, 4-14. <https://doi.org/10.17180/ciag-2024-vol90-art02-GB>
- [2] Commission, E. (2020). *Farm to Fork Strategy: For a Fair, Healthy and Environmentally-Friendly Food System*. Communication from the Commission.
- [3] Commission, E. (2023). *The common agricultural policy at a glance*. European Commission.
- [4] Commission, E. (2024). *CAP Strategic Plan: France At a Glance*. Directorate-General for Agriculture and Rural Development.
- [5] Commission., E. (2023). *CAP at a glance*. Agriculture and Rural Development.
- [6] Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- [7] Détang-Dessendre, C. (2024). Common Agricultural Policy 2023-2027: A lever for transforming French agriculture or a missed opportunity in the face of climate and environmental challenges? *Innovations Agronomiques*, 90, 1-3. <https://doi.org/10.17180/ciag-2024-vol90-art01-GB>
- [8] Dziubińska, A. (2022). *The Strategic Dimension of French Agricultural Policy*. Polski.
- [9] Europe, F. (2022). *France: CAP Strategic Plan 2023-27 Strategic Priorities*. Farm Europe.
- [10] Géry, C., & Lucas, F. (2025). *Second estimates for the 2024 Agricultural Accounts: Crops down, fall in products and inputs prices (Insee Première No. 2062)*. INSEE. <https://www.insee.fr/en/statistiques/8605349>
- [11] Grochowska, R. (2023). From a centralised to a diversified Common Agricultural Policy in the light of liberal intergovernmentalism theory. *Journal of Agribusiness and Rural Development*, 121.
- [12] l'Agriculture, M. d. (2022). *Plan Stratégique National de la PAC 2023-2027 de la France*. Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire.
- [13] Laroche Dupraz, C. (2024). CAP 2023-2027: A lever for transforming French agriculture? *Innovations Agronomiques*, 90, 15-17. <https://doi.org/10.17180/ciag-2024-vol90-art03-GB>
- [14] Lassalas, M., Guyomard, H., Détang-Dessendre, C., Chatellier, V., & Dupraz, P. (2024). The implementation of the new Common Agricultural Policy in France will not be environmentally ambitious. *Journal of Environmental Planning and Management*, 69(2), 1-26. <https://doi.org/10.1080/09640568.2024.2379310>
- [15] Luetteken, A. (2021). *Farm to Fork Strategy: 2030 Targets for Sustainable Food Production*. European Commission.
- [16] Mennig, P. (2024). A never-ending story of reforms: On the wicked nature of the Common Agricultural Policy. *npj Sustainable Agriculture*, 2, Article 20. <https://doi.org/10.1038/s44264-024-00027-z>

- [17] Midler, E. &. (2022). *Environment and Climate Assessment of France's CAP Strategic Plan*. Policy Report, Institute for European Environmental Policy (IEEP).
- [18] Midler, E. &. (2023). *Environment and climate assessment of France's CAP Strategic Plan [Policy report]*. Institute for European Environmental Policy, 3.
- [19] Moore, O. (2024). *Eco-schemes – Running to stand still?* ARC2020.
- [20] Moravcsik, A. &. (2018). *Liberal Intergovernmentalism. Dalam European Integration Theory*. Oxford University Press.
- [21] Muliawaty. (1997). *Perubahan sektor pertanian pada masa Trente Glorieuses di Prancis (Italic)*. Universitas Indonesia.
- [22] Muro, M., Nadeu, E., & Godfroy, A. (2025). *Seeking simplification in the complex environment of EU agriculture: Challenges and considerations*. Institute for European Environmental Policy (IEEP) Working Paper, 20 May 2025. <https://ieep.eu/news/seeking-simplification-in-the-complex-environment-of-eu-agriculture-challenges-and-considerations/>
- [23] OECD, O. f.-o. (2025). *Common Agricultural Policy Strategic Plan*. STIP compass.
- [24] Patel, R. (2009). Food sovereignty: Defining a new concept in sustainable food systems. *The Journal of Peasant Studies*, 36(3), 663–706. <https://doi.org/10.1080/03066150903143079>
- [25] Régnier, E. (2025). Quelles évolutions la politique agricole commune (PAC) post-2027 pourrait-elle connaître? Caisse des Dépôts Research Article (dalam konteks CAP masa depan). <https://iddri.org/en/publications-and-events/other-publication/what-developments-could-common-agricultural-policy-cap>
- [26] Veitch, H. (2025). Unions out of their league: Ethnographic insights into the 2024 French farmer protests. *Journal of Peasant Studies*.